

IMPLEMENTASI E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG SARANA PRASARA DAN PENYULUHAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

Disusun Oleh : MUHAMMAD NAJAIB
NIM : 2520201000150

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah, M.AP

Dosen Penguji : Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Dosen Penguji : Hendra Sukmana, M.KP

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2025



Latar Belakang

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian penting dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh, Dan Perwujudnyan Adalah Dengan Pengadaan Barang Dan Saja Secara Elektronik dengan menggunakan metode E-Purchasing yang memanfaatkan katalog elektronik menggantikan pengadaan konvensional.
2. Dasar Hukum
 - peraturan Presiden nomor : 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 50 ayat 2 bahwa bahwa pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - perbub Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Langsung Elektronik.
3. Kurangnya pemahaman teknis dan regulasi terkait *e-purchasing* Katalog Elektronik oleh admin Pengadaan Baru tanpa adanya kaderisasi sehingga Implementasi e-purchasing Katalog Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa masih ditemukan masalah.

Contoh : Kurang memahami dalam pemilihan produk, Pemesanan, dan pembuatan kontrak

Rumusan Masalah dan Tujuan

A. Permasalahan yang di hadapi dalam pengadaan secara elektronik:

Umumnya disebabkan oleh :

1. PPK dan admin pengadaan memiliki keterbatasan kompetensi mengenai proses pengadaan secara *e-purchasing* katalog elektroni
2. dalam pelaksanaan, khususnya pada tahapan pemilihan produk, pemesanan, penentuan spesifikasi teknis produk tidak sesuai ketentuan
3. Ketiga, keterlambatan proses sehingga membuat pengadaan menjadi terlambat

B. Tujuan

Untuk Menganalisis Implementasi E-Purchasing pada pengadaan barang dan jasa non kontruksi Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo

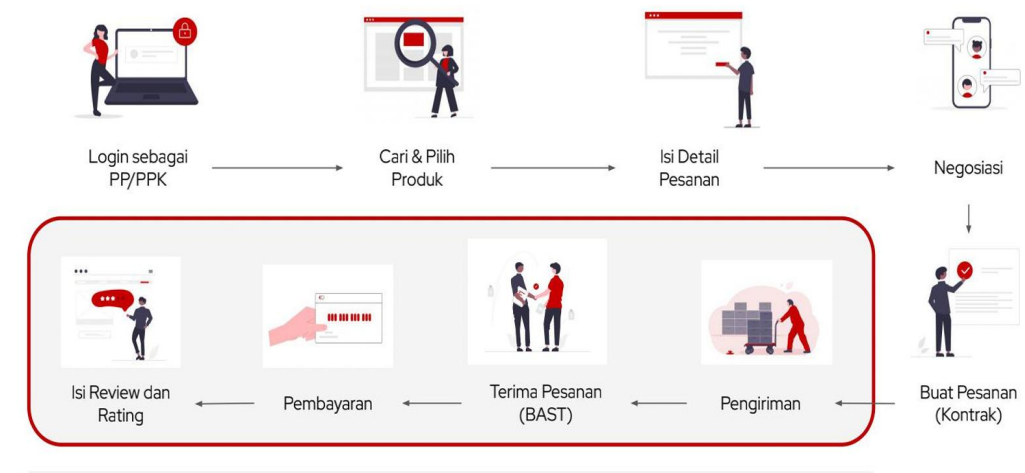
Gab Masalah

Keterbatasan Kompetensi dalam pemahaman teknis dan regulasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme *e-purchasing* Katalog Elektronik oleh admin Pengadaan.

Tabel I (Pengadan Barang dan Jasa *E-Purchasing* dan Ekatalog Elektronik

Tahun	Barang		Jasa	
	Perencanaan	Realisasi	Perencanaan	Realisasi
2023	53	53	16	16
2024	37	37	32	32
2025	113	112	54	54

Alur Proses Pembelian di Katalog Elektronik V6



Kajian Teori

Tori Implementasi Kebijakan

- Menggunakan model implementasi kebijakan **EDWARD III (1980)**.
- Fokus pada empat isu pokok yang menentukan efektivitas implementasi:
 - **Communication** (Komunikasi) Kebijakan
 - **Resources** (Sumber Daya) (kompentensi dan kualitas SDM)
 - **Disposition** (Sikap/Disposisi) sikap pelaksana
 - **Bureaucratic Structures** (Struktur Birokrasi) berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi

PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Hidayatullah dan Priyastiwi (2023)	Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) di Pemerintah Kabupaten Temanggung	pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) dipengaruhi jumlah SDM pengelola fungsi pengadaan barang/jasa, kompetensi SDM pengelola fungsi pengadaan barang/jasa, infrastruktur jaringan internet dan server, serta aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE
2	Deby Ariesta (2021)	Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa melalui <i>E-Catalogue</i> di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan	efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Catalogue</i> telah menunjukkan keberhasilan walaupun belum berjalan secara optimal. Dari segi waktu, proses pengadaan melalui <i>E-Catalogue</i> lebih cepat jika dibandingkan dengan metode konvensional
3	Hakim et al. (2025)	E-Purchasing Katalog Elektronik dan Kompetensi Pegawai dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Kepuasan Pelayanan Publik	kompetensi pegawai memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan layanan publik. Selain itu dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dapat melaksanakan proses pengadaan secara efektif, cepat, dan tepat

Metode Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
2. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan ***purposive sampling***
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi **wawancara, observasi, dan dokumentasi**, dengan menggunakan **data primer dan data sekunder**
4. menganalisis data mengacu pada model **Miles dan Huberman**, yang meliputi tahap **reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi**

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Implementasi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku
- Menurut Edward III (1980) dalam (Fachrudin & Fanani, 2024), keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: komunikasi antar pelaku, ketersediaan sumber daya pendukung, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
- Komunikasi berhubungan dengan sikap dan reaksi individu yang terlibat serta bagaimana kebijakan disampaikan dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan atau masyarakat umum. Sumber daya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Disposisi berkaitan dengan kesediaan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik.

KOMUNIKASI

Penyampaian informasi e-purchasing katalog elektronik di Bidang Sarana Prasaran dan Penyuluhan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam aspek komunikasi sudah disosialisasikan namun tidak ada pelatihan secara khusus tentang prosedur pelaksanaan e-purchasing sehingga menyebabkan kebingungan terhadap pelaksana kebijakan

SUMBER DAYA

Sumber daya infrastruktur di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sudah terpenuhi, namun kompetensi SDM masih memiliki keterbatasan karena kurang memahami pedoman operasional. Hal ini menyebabkan kelengkapan administrasi belum siap saat pelaksanaan pengadaan sehingga proses e-purchasing mengalami keterlambatan.

DISPOSISI

Pelaksana kebijakan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan e-purchasing sesuai peraturan, penerimaan yang positif terhadap kebijakan, serta sikap tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugas.

BIROKRASI

SOP yang digunakan di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo berdasar surat keputusan kepala LKPP No. 17 Tahun 2024 dan diperkuat oleh surat Sekda Sidoarjo no. 000/16888/438.1.2/2025 tentang pedoman persiapan e-purchasing. Untuk pembagian tugas dan wewenang berdasarkan perpres no. 12 Tahun 2021.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Implementasi e-purchasing katalog elektronik di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan namun masih terdapat kendala pada faktor komunikasi dan sumber daya. Meskipun ada komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang mendukung, kebijakan tidak akan terwujud secara optimal jika kompetensi SDM masih memiliki keterbatasan dan dalam aspek komunikasi tidak ada pelatihan
- secara khusus tentang prosedur e-purchasing. Rekomendasi :
 1. peningkatan kemampuan SDM dengan cara melakukan bimtek atau pelatihan intensif secara berkala
 2. pelatihan harus disosialisasikan secara merata terhadap semua pihak pelaksana kebijakan agar mendapat informasi yang sama
 3. membuat ringkasan buku panduan dengan cara meringkas aturan yang panjang ke dalam infografis atau buku saku digital yang mudah diakses oleh para pelaksana kebijakan
 4. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi katalog elektronik pengadaan barang dan jasa

Terima Kasih

